

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1.Konsep Kesejahteraan Sosial**

##### **2.1.1. Pengertian Kesejahteraan Sosial**

Kesejahteraan Sosial adalah sesuatu kondisi yang dimana orang, keluarga, pertemuan dan jaringan dapat terpenuhi kebutuhan mendasar mereka. Mengenai salah satu sistem tersebut, pemerintah, pemerintah dapat membantu mereka yang menghadapi tantangan dalam mewujudkan kesejahteraan sosialnya. Upaya pemerintah untuk melaksanakan program yang dirancang dengan baik yang mempromosikan kesejahteraan sosial. Definisi Friedlander tentang kesejahteraan sosial (Fahrudin 2012: 9), sebagai berikut:

Kesejahteraan sosial adalah pengaturan terkoordinasi dari administrasi dan organisasi sosial yang dimaksudkan untuk membantu orang-orang dan kelompok untuk mencapai kehidupan dan kesejahteraan yang memadai dan hubungan individu dan sosial untuk memberdayakan mereka untuk meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan mereka sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.

Definisi sebelumnya menunjukkan bahwa pelayanan dan lembaga sosial dapat berkontribusi pada peningkatan fungsi sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial.

### **2.1.2. Tujuan Kesejahteraan Sosial**

Karena kesejahteraan sosial bertujuan untuk memastikan bahwa setiap manusia terus hidup, kondisi selalu dicari di daerah ini. Menurut (Fahrudin 2012:10) Kesejahteraan sosial mempunyai tujuan, sebagai berikut :

1. Mencapai rutinitas sehari-hari yang sejahtera dalam artian mencapai prinsip-prinsip pengalaman yang esensial, misalnya pangan, sandang, rumah aman, kesejahteraan, dan hubungan sosial yang sesuai dengan keadaannya saat ini.
2. Untuk mencapai perubahan besar, terutama dengan orang-orang dalam keadaan mereka saat ini, misalnya dengan menyelidiki sumber, meningkatkan dan mengembangkan cara hidup yang memuaskan.

Menurut Fahrudin, tujuan kesejahteraan sosial adalah untuk mencapai kesejahteraan sosial. Untuk melakukannya, kebutuhan dasar harus dipenuhi dan hubungan masyarakat harus dibangun. Dengan adanya hal tersebut, kesejahteraan sosial dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber daya masyarakat.

### **2.1.3. Fungsi Kesejahteraan Sosial**

Setiap bangsa menjamin kualitas hidup yang tinggi, dan kesejahteraan sosial merupakan kondisi yang sangat penting bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Namun, pada kenyataannya, masalah kesejahteraan mempengaruhi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat secara tidak terpisahkan, sehingga kesejahteraan sosial memiliki banyak tujuan. Menurut Friedlander dan Apte (Fahrudin, 2012:12) fungsi kesejahteraan sosial yaitu :

a. Fungsi Pencegahan (*Preventive*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk membentengi masyarakat, keluarga dan jaringan agar terhindar dari isu-isu masalah sosial baru. Dalam tatanan sosial sesaat, upaya antisipasi ditekankan pada latihan untuk membantu membuat contoh baru hubungan sosial dan organisasi persahabatan baru.

b. Fungsi Penyembuhan (*Curative*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan keadaan cacat fisik, mendalam dan sosial sehingga individu yang mengalami masalah ini dapat bekerja secara normal kembali di arena publik. Kemampuan ini menggabungkan kemampuan penyembuhan (rehabilitasi).

c. Fungsi Pengembangan (*Development*)

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

d. Fungsi Penunjang (*Supportive*)

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu pencapaian tujuan daerah atau bidang-bidang lain dari pelayanan kesejahteraan sosial.

Dilihat dari pengertian fungsi kesejahteraan sosial menurut Friedlander, kesejahteraan memiliki fungsi kemampuan yang berbeda-beda. Kesejahteraan sosial dapat menyesuaikan fungsi mana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan karena masyarakat memiliki karakteristik tersendiri dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.

## **2.2.Konsep Pekerjaan Sosial**

### **2.2.1. Pengertian Pekerjaan Sosial**

Pekerjaan sosial adalah bidang pekerjaan kesejahteraan sosial yang melibatkan membantu individu, kelompok, keluarga, dan komunitas dalam menyelesaikan masalah mendasar untuk meningkatkan fungsi sosial dan masyarakat secara keseluruhan. Adapun definisi pekerjaan sosial menurut Asosiasi Nasional Pekerja Sosial Amerika Serikat (NASW) (Fahrudin, 2012:60).

Pekerjaan sosial membutuhkan bantuan orang, pertemuan atau jaringan dalam memperluas atau membangun kembali kemampuan mereka untuk hubungan sosial dan menumbuhkan keadaan sosial yang membantu tujuan tersebut. Penggunaan ahli nilai-nilai, standar dan teknik pekerjaan sosial untuk setidaknya salah satu tujuan berikut adalah praktik pekerjaan sosial: membantu individu mendapatkan administrasi yang substansial, memberikan bimbingan dan psikoterapi kepada orang, keluarga, dan kelompok, membantu jaringan atau kelompok memberi atau bekerja pada administrasi yang ramah dan kesejahteraan; terlebih lagi, ikut serta dalam siklus administrasi terkait. Praktik pekerjaan sosial membutuhkan informasi tentang cara manusia berperilaku dan perbaikan; tentang pendirian yang ramah, moneter, dan sosial; lebih jauh lagi, tentang kolaborasi antara sejumlah besar elemen ini.

Menurut definisi NASW, pekerjaan sosial adalah kegiatan profesional yang meningkatkan kondisi sosial individu, kelompok, keluarga, atau komunitas dengan

memberikan bimbingan atau layanan sosial kepada kelompok, keluarga, atau komunitas tersebut.

### **2.2.2. Unsur-Unsur Pekerjaan Sosial**

Pekerjaan sosial sebagai mata pencaharian memiliki bagian-bagian penting yang harus dipahami saat melakukan kegiatan, bagian-bagian yang harus dipahami termasuk data, kompensasi yang mendasari pola pikir, metodologi dan teknik yang digunakan dalam siklus pendampingan. Komponen inti yang mendasari pekerjaan sosial di mana pun itu dibor termasuk menurut Hepworth, Rooney, dan Larsen (Fahrudin, 2012: 65) termasuk: Alasan / tujuan panggilan, nilai dan moral, informasi mendasar tentang praktik langsung, teknik dan siklus yang diselesaikan.

Mengingat poin-poin yang dibuat oleh Hepworth, Rooney, dan Larsen, pekerjaan sosial harus memahami dan menyelidiki poin-poin ini untuk meningkatkan kualitas pekerja sosial secara keseluruhan dan memungkinkan mereka terampil dalam membantu individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

### **2.2.3. Tujuan Praktik Pekerjaan Sosial**

Praktek pekerjaan sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, membantu memenuhi kebutuhan dasar manusia, dan memberikan perhatian khusus pada kebutuhan orang-orang yang sedang berjuang. Menurut NASW (Fahrudin, 2012:66), berikut adalah tujuan dari praktik pekerjaan sosial:

1. Bekerja pada kapasitas individu untuk mengurus masalah, bertahan (*coping*), kemajuan.

2. Menghubungkan individu dengan kerangka kerja yang melengkapi mereka dengan sumber daya, administrasi, dan pintu terbuka potensial.
3. Kerjakan kerangka kerja yang memadai dan simpatik yang melengkapi individu dengan sumber daya dan administrasi.
4. Buat dan kerjakan pengaturan yang bersahabat.

Menurut Zastrow (Fahrudin, 2012:67), poin tambahan dari tujuan tersebut di atas antara lain:

1. Mengerjakan bantuan kesejahteraan manusia dan mengurangi kebutuhan, penyalahgunaan dan berbagai jenis ketidakadilan sosial.
2. Mencari pengaturan, administrasi, dan aset melalui dukungan dan kegiatan sosial dan politik yang meningkatkan keadilan sosial dan moneter.
3. Ciptakan dan manfaatkan eksplorasi, informasi, dan kemampuan yang memajukan praktik pekerjaan sosial.
4. Buat dan laksanakan latihan di berbagai lingkungan sosial. Meningkatkan Kesejahteraan manusia dan mengurangi kemiskinan, penindasan, dan bentuk-bentuk ketidakadilan sosial lainnya.

Berdasarkan tujuan praktik pekerjaan sosial menurut NASW dan Zastrow, tujuan dari praktik pekerjaan sosial adalah membantu dan memberdayakan individu, kelompok, keluarga, dan masyarakat untuk menciptakan keberfungsian sosial. Selain itu, praktik pekerjaan sosial membantu perbaikan kebijakan dan membantu sumber daya yang membutuhkan layanan sosial dalam mengejar kebijakan.

#### **2.2.4. Fokus Pekerjaan Sosial**

Pekerjaan sosial memiliki penekanan pada penyelesaian pelatihannya, titik fokus pekerjaan sosial itu sendiri adalah pekerjaan sosial, sesuai penilaian Fahrudin,

(2012: 62) Konsentrasi atau fokus utama pekerjaan sosial adalah pekerjaan sosial atau social working.

Menurut Fahrudin, keberfungsian sosial merupakan fokus utama dari pekerjaan sosial itu sendiri. Pekerja sosial membantu mengembalikan keberfungsian individu, kelompok, keluarga, dan masyarakat yang mengalami hambatan karena dalam praktiknya, pekerjaan sosial itu sendiri difokuskan untuk memberikan bantuan kepada individu, kelompok, keluarga, dan masyarakat yang mengalami hambatan tersebut. Akibatnya, keberfungsian sosial itu sendiri perlu menjadi fokus utama dari praktik pekerjaan sosial. Strategi pekerjaan sosial berikut menggambarkan efektivitas pekerja sosial dalam meningkatkan fungsi sosial: Miley dan Dubois (Suharto, 2009: 5):

1. Mengusahakan kapasitas individu untuk mengelola permasalahan yang dialaminya.
2. Mengaitkan individu dengan kerangka sosial dan organisasi yang memberdayakan mereka untuk menjangkau atau memperoleh aset, layanan, dan pintu terbuka yang berbeda.
3. Mengerjakan pameran organisasi sosial agar dapat memberikan bantuan sosial secara sukses, berkualitas dan empatik.
4. Membentuk dan menumbuhkan instrumen dan pedoman hukum yang dilengkapi untuk menyebabkan apa yang terjadi untuk mencapai keadilan moneter dan hak-hak sipil. Meningkatkan kemampuan orang dalam menghadapi masalah yang dialaminya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, pekerja sosial memiliki strategi untuk meningkatkan keberfungsian sosial klien yang bertujuan untuk mengembalikan

keberfungsian klien, dan pekerja sosial membantu klien dan menghubungkannya dengan lembaga sosial agar klien dapat kembali keberfungsian sosialnya.

### **2.2.5. Peran-Peran Pekerjaan Sosial**

Secara praktis, pekerja sosial melakukan berbagai peran penting untuk membantu klien dalam mengatasi masalah. Penggunaan pekerjaan setiap pekerja sosial diubah sesuai dengan permasalahan yang dilihat oleh klien. Seperti yang ditunjukkan oleh Parsons, Jorgensen, dan Hernandez (Pujileksono, 2019), pekerja sosial mengambil bagian-bagian berikut:

- a. Fasilitator
- b. Broker
- c. Mediator
- d. Pembela
- e. Pelindung
- f. Pendidik.

Menurut Parsons, Jorgensen, dan Hernandez dalam jurnal Pujileksono 2009, peran pekerja sosial dalam menghadapi klien antara lain sebagai fasilitator, broker, mediator, pembela, pelindung, dan pendidik. Pekerja sosial harus menguasai tanggung jawab ini untuk membantu klien dalam menemukan solusi untuk masalah mereka.

### **2.3.Konsep Masalah Sosial**

Kondisi dimana terjadi penyimpangan sosial dari norma sosial disebut sebagai masalah sosial. Menurut Weinberg, pengertian masalah sosial (Soetomo, 2015: 7), yaitu:



Masalah sosial adalah keadaan yang dikomunikasikan sebagai kebalikan dari warga negara yang kritis, di mana mereka setuju bahwa aktivitas diharapkan mengubah apa yang sedang terjadi. Dari definisi tersebut terdapat komponen-komponen penting, yaitu:

- a. Suatu situasi yang dinyatakan.
- b. Warga masyarakat yang signifikan.
- c. Kebutuhan akan Tindakan pemecahan masalah.

Menurut definisi Weinberg di atas, masalah sosial adalah situasi atau rangkaian keadaan yang bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat dan memerlukan penyelesaian agar situasi atau situasi tersebut dapat berfungsi dengan baik dan sejalan dengan nilai-nilai masyarakat.

### **2.3.1. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**

Masyarakat, keluarga, kelompok, dan masyarakat menghadapi masalah yang disebut dengan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) karena tidak mampu memenuhi kebutuhan sosialnya dan tidak dapat berfungsi secara sosial. Menurut Hanayani (2016), kebutuhan akan pelayanan kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai berikut:

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah orang perseorangan, keluarga, kelompok, atau potensi daerah setempat yang karena suatu halangan, kesulitan atau kejengkelan tidak dapat menjalankan kemampuan sosialnya, sehingga kebutuhan fisik, batin dan sosialnya tidak dapat dipenuhi secara cukup dan wajar.

Menilik dari definisi yang dikemukakan di atas, penyandang masalah kesejahteraan sosial yang sekarang telah berubah menjadi pemerlu pelayanan adalah individu, keluarga, atau kelompok yang mengalami hambatan dalam bantuan pemerintah yang ramah dalam menuntaskan kemampuan sosialnya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara tulus, mendalam, maupun sosial.

## **2.4.Keberfungsian Sosial**

### **2.4.1. Pengertian Keberfungsian Sosial**

Pekerjaan sosial adalah batas orang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan persyaratan iklim dalam kemampuan mereka. Terkait dengan pengertian kerja sosial menurut Bartlett (Fahrudin, 2012:62) kerja sosial adalah kemampuan untuk bertahan (menyesuaikan) permintaan ekologis yang menjadi tugas hidup. Sesuai dengan definisi Bartlett dalam Fahrudin, kemampuan sosial individu adalah kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban hidup.

## **2.5.Konsep Pelayanan Sosial**

### **2.5.1. Pengertian Pelayanan Sosial**

Selain fakta bahwa arti pelayanan sosial bervariasi dari satu negara ke negara lain, pelayanan sosial adalah istilah yang sulit untuk didefinisikan. Layanan dan manfaat yang berpusat pada orang, misalnya, disebut demikian di Inggris. Fahrudin (2012) mengutip Romanyshyn (1971) sebagai sumber: 51) Pelayanan sosial didefinisikan sebagai berikut:

Pelayanan sosial sebagai upaya untuk membangun kembali, mengikuti, dan mengerjakan pekerjaan sosial orang dan keluarga melalui 1. Mendukung aset sosial, dan 2. Siklus peningkatan kemampuan orang dan keluarga untuk

menyesuaikan diri dengan tekanan dan permintaan masyarakat biasa aktivitas.

Mengingat definisi diatas, tujuan pemberian layanan adalah untuk meningkatkan dan mempertahankan fungsi sosial seseorang untuk memulihkan keadaan normal dan meningkatkan kualitas hidup seseorang dengan dukungan yang memadai. Jadi jelas diperlukan layanan yang ramah seiring dengan modernisasi saat ini untuk dapat membantu orang-orang yang memiliki masalah sosial.

## **2.6.Konsep Manusia Usia Lanjut / Lanjut Usia (LANSIA)**

### **2.6.1. Pengerian Manusia Usia Lanjut / Lanjut Usia**

Lanjut Usia (Lansia) berasal dari kata Geros, sedangkan ilmu yang mempelajari tentang lansia adalah gerontologi. Gerontologi adalah suatu cabang ilmu yang membahas secara rinci faktor-faktor yang berhubungan dengan lansia. Gerontologi adalah cabang ilmu yang mempelajari proses menua dan masalah-masalah yang mungkin terjadi pada lansia (Miller, 1990). Menua atau aging adalah suatu proses menghilangnya secara perlahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri/ mengganti diri dan mempertahankan struktur dan fungsi normalnya sehingga tidak dapat bertahan terhadap jejas (termasuk infeksi) dan memperbaiki kerusakan yang diderita Constantinides, 1994(kasrida dahlan,2018:7).

Dapat disimpulkan berdasarkan definisi diatas manusia usia lanjut adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas. Proses penuaan akan berdampak pada berbagai aspek kehidupan, baik aspek sosial, ekonomi dan terutama aspek kesehatan

### **2.6.2. Pengertian Manusia Usia Lanjut Terlantar**

Menurut Permensos No.8 Tahun 2012 pasal 1 ayat 3 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Terdapat 26 jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) salah satunya adalah lanjut usia terlantar. Menurut Permensos No.8 Tahun 2012 menyebutkan bahwa lanjut usia terlantar adalah: “seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya”. Lanjut usia terlantar memiliki kriteria, yaitu:

1. Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan
2. Terlantar secara psikis dan sosial.

## **2.7. Konsep Jaminan Kesehatan**

### **2.7.1. Pengertian Jaminan Kesehatan**

Dua peraturan pelaksanaan UU SJSN, yaitu peraturan pemerintah No. 101 tahun 2012 Tentang penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dan peraturan Presiden No. 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan menerapkan bahwa yang dimaksud dengan :

Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi

kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah (Jaminan Kesehatan Nasional JKN, 2014:07)

Dapat disimpulkan berdasarkan definisi diatas program jaminan sosial yang menjamin biaya pemeliharaan kesehatan serta pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan yang diselenggarakan nasional secara bergotong- royong wajib oleh seluruh penduduk indonesia dengan membayar iuran berkala atau uiran dibayari oleh pemerintah kepada badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan nirlaba- BPJS Kesehatan.

Program perlindungan kesehatan dari pemerintah adalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Lewat program ini, masyarakat yang membayar iuran bisa mendapatkan berbagai layanan kesehatan. Oleh karena itu, program JKN ini bisa disebut model asuransi kesehatan yang dikelola oleh negara melalui sebuah badan hukum, yaitu BPJS Kesehatan. Untuk kepesertaan BPJS Kesehatan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI).

### **2.7.2. PBI**

Penerima Bantuan iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan (Peraturan Presiden no.82 Tahun 2018,Pasal 1).

Melihat definisi diatas bahwa BPJS PBI atau Penerima Bantuan Iuran tergolong fakir miskin atau orang tidak mampu. Penetapan status tersebut diputuskan dan didaftarkan oleh menteri penyelenggara urusan pemerintahan di bidang sosial. Oleh

karena itu, peserta BPJS PBI tidak perlu membayar penuh karena sudah mendapatkan subsidi iuran yang dibayar oleh pemerintah pusat.

### **2.7.3. Non PBI**

Para peserta BPJS Kesehatan non-PBI ini telah dikelompokkan menjadi tiga kategori. Berikut adalah kelompoknya:

#### **a. Pekerja Penerima Upah (PPU)**

Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah (Peraturan Presiden no.82 Tahun 2018,Pasal 1).

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan peserta BPJS Non PBI yang pertama adalah PPU atau orang yang bekerja pada pemberi kerja dan menerima gaji atau upah, yaitu:

- Pejabat negara
- Pimpinan dan anggota DPRD
- PNS
- Prajurit
- Anggota Polri
- Kepala desa dan perangkat desa
- Pegawai swasta
- Pekerja/pegawai yang tidak termasuk golongan di atas yang menerima gaji atau upah

Kepesertaan PPU dalam program BPJS Kesehatan didaftarkan oleh pemberi kerja, sedangkan iuran BPJS Kesehatan dibayar oleh pemberi kerja dan pekerja.

b. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)

Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri (Peraturan Presiden no.82 Tahun 2018,Pasal 1).

Dapat disimpulkan Pekerja Bukan Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri. Peserta BPJS Non PBI kategori kedua adalah PBPU atau orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri, yaitu:

- Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri
- Pekerja yang tidak termasuk golongan di atas yang tidak menerima gaji atau upah.

Untuk mendapatkan layanan BPJS, peserta PBPU mendaftarkan dirinya sendiri atau secara kolektif ke BPJS Kesehatan dan kemudian membayar iuran sendiri.

c. Bukan Pekerja (BP)

Bukan pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok PPU, PBPU, PBU Jaminan Kesehatan, dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (Peraturan Presiden no.82 Tahun 2018,Pasal 1).

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan Kategori peserta BPJS Non PBI terakhir adalah BP atau Bukan Pekerja. Artinya, orang tersebut tidak termasuk kelompok PPU, PBPU, atau PBI. Berikut daftar peserta BPJS Non PBI Bukan Pekerja.

- Investor
- Pemberi kerja
- Penerima pensiun
- Veteran

- Perintis kemerdekaan
- Janda, duda, atau anak yatim dan/atau piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan
- BP yang tidak termasuk dalam golongan di atas, yang mampu membayar iuran

Jika termasuk dalam kategori ini, Bukan Pekerja atau BP mendaftarkan diri sendiri atau secara kolektif serta membayar iurannya sendiri.

## **2.8.Konsep Kemiskinan**

### **2.8.1. Pengertian Kemiskinan**

Supriatna (1997:90) menyatakan bahwa kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan bisa disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang ada, baik lewat jalur pendidikan formal maupun nonformal yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya pendidikan informal.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, keluarga, maupun kelompok, sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial yang lain. Kemiskinan dipandang sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.



## **2.9.Konsep UHC**

### **2.9.1. Pengertian UHC**

UHC merupakan harapan dan target yang ingin diraih oleh negara ( dalam hal ini pemerintah sebagai pelaksana kebijakan) dalam rangka menjamin fasilitas pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan kesehatan dasar masyarakat (hartini 2019:1)

Sistem asuransi kesehatan yang dikenal sebagai universal health coverage, atau UHC, memastikan bahwa setiap anggota populasi memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas tinggi untuk promosi, pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), cakupan kesehatan universal (UHC) bertujuan untuk memastikan bahwa semua individu memiliki akses ke layanan kesehatan esensial untuk promosi, pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi, yang semuanya memiliki kualitas yang memadai untuk memastikan kemanjurannya dan tidak adanya kesulitan keuangan bagi penerimanya.

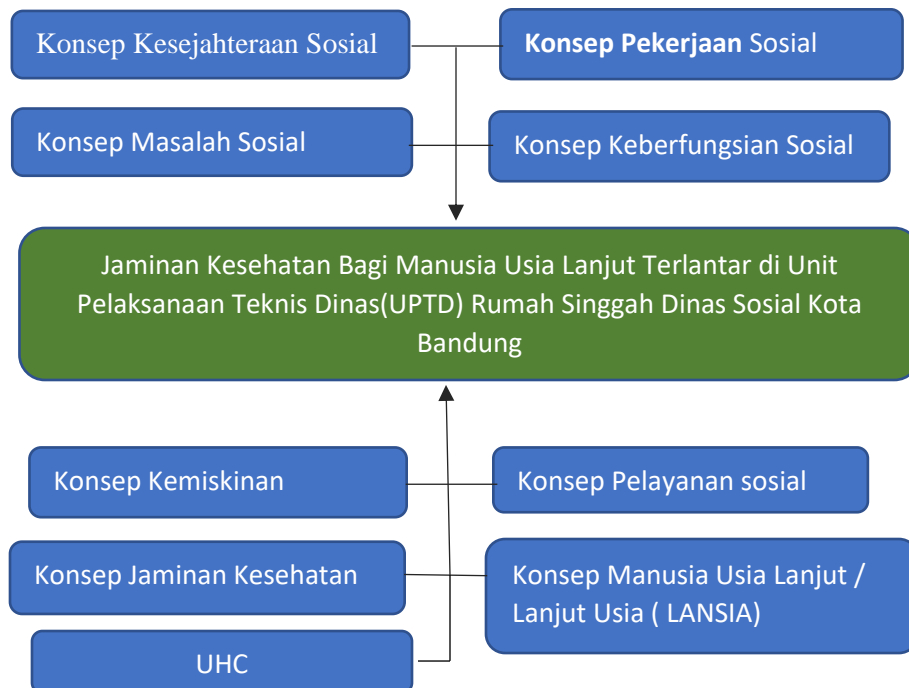
### **2.9.2. Tujuan UHC**

Konsep UHC bertujuan untuk semua penduduk mendapatkan akses pelayanan kesehatan baik secara promotif, preventif, kuratif, serta rehabilitatif (putri suni:2019:93)

UHC berisi dua komponen utama untuk lebih spesifik: Akses ke layanan kesehatan yang adil dan berkualitas untuk setiap penduduk dan jaminan risiko keuangan ketika penduduk menggunakan layanan kesehatan.

## 2.10. Peta Konsep

Porter dan Hernacki, menjelaskan bahwa peta konsep merupakan metode mencatat secara menyeluruh dalam satu halaman. Peta konsep menggunakan pengingat-pengingat visual dan sensorik dalam suatu pola dari ide-ide yang berkaitan. Peta konsep pada dasarnya menggunakan citra visual dan prasarana grafis lainnya yang membentuk kesan pada otak (Buzan, 2010) (dalam chusni, 2018:4).berikut ialah gambar peta konsep:



**Gambar 2. 1.**

**Peta Konsep Teori-Teori**

Penyajian dengan peta konsep adalah suatu upaya penyajian tentang ringkasan konsep yang menubukkan keterkaitan antara konsep sehingga terlihat secara menyeluruh bahan yang dipelajari serta menjadi komprehensif. Berdasarkan peta konsep di atas teori-teori atau konsep tersebutlah yang sesuai dan relevan dengan pembahasan mengenai “Jaminan Kesehatan Bagi Manusia Usia Lanjut Terlantar di Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Bandung”.